

PENGAWASAN OVER DIMENTION OVER LOADING (ODOL) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Syafariyani¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,
Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
syafariyani@student.uir.ac.id lilissuryani@soc.uir.ac.id

Abstract

This research was conducted at the Pekanbaru City Transportation Agency to anticipate and prevent violations in driving, especially on Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles. The purpose of this study was to determine how Over Dimension Over Loading (ODOL) Vehicle Supervision is carried out in Pekanbaru City, as well as to determine the inhibiting factors in the implementation of supervision. The type of research used is descriptive qualitative. Qualitative research is a research method by directly describing the phenomena that occur in the research object. The data obtained from this study were through interviews, observations and documentation. There are 3 indicators used, namely: Establishing Measuring Instruments (Standards), Conducting Assessment Actions (Evaluation) and Taking Corrective Actions (Corrective Action). The results of the study indicate that the implementation of Over Dimension Over Loading (ODOL) supervision has been running, but it cannot be said to be optimal. The inhibiting factors in the implementation of Over Dimension Over Loading Vehicle Supervision are the lack of budget provided to carry out supervision activities in the field and the lack of driver understanding in driving which causes the implementation of Over Dimension Over Loading Vehicle Supervision in Pekanbaru City to be less than optimal.

Key Words : *Supervision, Over Dimension, Over Loading*

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara, terutama pada kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Indikator yang digunakan ada 3 yaitu: Menetapkan Alat Ukur (Standar), Mengadakan Tindakan Penilaian (Evaluasi) dan Melakukan Tindakan Perbaikan (*Corrective action*). Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *over dimension over loading* ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang meyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan *Over dimension over loading* di Kota Pekanbaru.

Key Words : *Pengawasan, Over Dimention, Over Loading*

Pendahuluan

Alat transportasi adalah sebagai sarana untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran dalam proses pengangkutan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan distribusi barang hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air. Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas dan angkutan jalan yang juga merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat.

Transportasi umumnya dipahami sebagai aktivitas memindahkan atau menggerakkan sesuatu baik barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengiriman barang memunculkan layanan angkutan. Secara fundamental, transportasi memiliki peran utama yaitu memenuhi kebutuhan mobilitas serta mendorong pembangunan. Tantangan dalam sektor transportasi merupakan isu yang dihadapi oleh negara berkembang maupun maju. Di Indonesia sendiri, salah satu permasalahan yang mencuat adalah pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di sektor industri dan perdagangan di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor 469 tahun 2019 tentang jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adanya peraturan Menteri Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang kendaraan bermotor di jalan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan serta memperkuat integrasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan sejalan dengan UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingginya permintaan terhadap transportasi barang sering kali menyebabkan muatan yang melebihi kapasitas yang diizinkan. Ditambah dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, hal ini mempercepat kerusakan jalan. Salah satu faktor utama kerusakan tersebut adalah maraknya pelanggaran muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang.

Over Loading adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimension* merupakan situasi di mana ukuran kendaraan pengangkut telah dimodifikasi sehingga tidak lagi sesuai dengan standar pabrik. Praktik ini sering dilakukan dengan tujuan menekan biaya transportasi,

mengurangi pengeluaran operasional kendaraan, serta menghemat pengeluaran untuk perizinan, retribusi, dan waktu tempuh. Namun sayangnya, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini justru berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang dilaluinya.

Peraturan terkait kendaraan *over dimension over loading*, yaitu kendaraan yang membawa muatan berlebih atau telah dimodifikasi tidak sesuai dengan standar pabrikan, diatur dalam ketentuan yang tercantum pada pasal 277 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan membuat merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi uji tipe”. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar pihak atau pengemudi terkait kendaraan yang dioperasikan mematuhi aturan yang ada akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dari pengemudi maupun pengusaha yang masih tidak mematuhi peraturan tentang tindakan yang diambil dengan tujuan menekan biaya transportasi, efisiensi pengeluaran operasional kendaraan, penghematan atas biaya perizinan, angsuran, maupun biaya tambahan lainnya, serta untuk mempercepat waktu tempuh perjalanan. Oleh karena itu dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan dilakukan pengemudi kendaraan perlu diadakannya tindakan yang dapat mengurangi atau meminimalisir untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan yang perlu dilakukan dengan mengadakan kegiatan pengawasan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru dinilai belum berjalan secara optimal, sebagaimana terlihat dari tingkat pelanggaran kendaraan bertonase berat masih tinggi, seperti masih terdapat kurangnya pemahaman pengemudi mengenai jalan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dinas perhubungan perlu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membawa angkutan bertonase berat. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang perlu ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Saat ini, peningkatan jumlah kendaraan dengan muatan berat berdampak pada terganggunya ketertiban lalu lintas di wilayah kota, karena kendaraan tersebut kerap melintasi jalan-jalan dalam kota dan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Pelanggaran muatan melebihi muatan sumbu terberat (MST) kendaraan dengan kapasitas jalan atau lintasan jalan umum di kota Pekanbaru berdasarkan observasi penelitian hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak sesuai dilewati kendaraan muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan muatan besar (truk roda 10 dan lebih).

Berdasarkan dari fenomena dan observasi peneliti dilapangan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengawasan kendaraan muatan berat yang melebihi kapasitas dan ukuran dimensi di jalan umum di kota Pekanbaru, yaitu Masih adanya ditemukan kendaraan bertonase yang melebihi muatan (*Over Load*) dan melebihi batas ukuran kendaraan (*Over Dimention*) yang melintas di jalan umum pada waktu yang dilarang seperti di simpang lampu merah, HR. Soebrantas, Jl. SM. Amin, Jl. Pasir putih maupun di jalan lainnya dan Kurangnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan (regulasi) angkutan barang, sehingga masih banyak ditemukan pengemudi (supir) yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, sehingga bisa mengganggu pengguna jalan terhadap pengendalian lain dan menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana peran stakeholder lain seperti Dishub Provinsi, Ditlantas, dan BPTD dalam menciptakan sistem pengawasan *Over Dimention Over Loading* (ODOL) yang tertib. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini.

Dengan demikian, latar belakang ini memberikan pemahaman mendalam bahwa pengawasan *Over Dimention Over Loading* (ODOL) merupakan bagian penting dari manajemen transportasi perkotaan dan pelayanan publik. Ketidakefisienan dalam pengawasan tidak hanya berdampak pada PAD, tetapi juga mengganggu ketertiban lalu lintas, menciptakan ketidaknyamanan pengguna jalan, dan menurunkan citra pelayanan pemerintah di mata masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi Publik

Syafariyani¹ dan Lilis Suriani²

Journal of Public Administration Review Vol 2 No 2 / 2025

835

Administrasi berasal dari bahasa latin *administrare* yaitu *ad* yang berarti pada dan *ministrare* yang berarti melayani, bila ditinjau dari asal kata tersebut berarti memberikan pelayanan kepada. Adminitrasi berasal juga dari bahasa Inggris yaitu *administration* yakni *to administer* yang berarti *to manage* atau mengelola dan *to direct* atau menggerakkan, bila ditinjau dari asal kata tersebut berarti mengelola atau menggerakkan (Indradi, 2006:1). Kata public sendiri menurut pasong (2008;6) adalah, “public pada dasarnya berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat”.

Menurut silalahi (2012;11) administrasi merupakan aktivitas kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan pembagian tugas yang terstruktur, menggunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Menurut Willman H. Newman dalam bukunya *Administration Action*, administrasi merupakan proses mengarahkan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas kelompok orang untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan bersama (dalam Nawawi, 2013;79).

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2015;139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut James D. Mooney organisasi dapat dipahami sebagai suatu wadah atau bentuk kerja sama yang terjalin dalam setiap kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. (dalam Nawawi, 2013;75).

Sementara itu, Herbert A. Simon, organisasi merupakan suatu tatanan kompleks yang terdiri dari pola komunikasi dan interaksi lainnya yang terbentuk di antara sekelompok individu dalam suatu kelompok.(dalam Nawawi, 2013;75).

Konsep Manajemen

Ralph C Davis mendefinisikan bahwa manajemen adalah fungsi dari pada setiap pimpinan eksekutif Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan

(*Planning*). pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pada fungsi perencanaan tercakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan fungsi penggerakkan (*budgeting*). Dalam fungsi pengorganisasian meliputi fungsi penunjukkan staff (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*), dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*). Sementara fungsi penggerakkan meliputi fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*), dan fungsi memimpin (*leading*). Sedangkan fungsi pengawasan terdiri dari fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*), dan fungsi pengendalian (*reaning*). (dalam Hamin,2015,15).

Definisi lainnya dari manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry. Menurutnya manajemen adalah: "*management is distinct process consisting of planing, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources* (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sertamencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya)".

Konsep Pengawasan

Menurut M Manullang pengawasan (2005: 183) adalah suatu proses yang bertujuan untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi jika perlu, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula.

Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses yang meliputi penetapan standar yang ingin dicapai, pemantauan terhadap pelaksanaan, evaluasi hasil pelaksanaan, di perlukan tindakan korektif agar pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana dan sejalan dengan standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Robert J. Mockler, pengawasan adalah upaya sistematis untuk: Menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, Merancang sistem informasi umpan balik, Membandingkan kegiatan nyata dengan standar, Menentukan dan mengukur deviasi-deviasai, Mengambil tindakan koreksi.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Menurut Thomas, jika pemerintah melakukan sesuatu pasti ada tujuannya dan begitu pula ketika pemerintah memilih untuk tidak mengambil suatu tindakan, keputusan tersebut tetap memiliki maksud tertentu. Sebab, kebijakan publik merupakan bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan demi kepentingan masyarakat.

Menurut Charles L. Cochran & Eloise F. Malone (1995) Kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Kebijakan public berisi sebuah rencana Tindakan atau program dan berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain, sebuah peta dan sebuah tujuan.

Trasportasi

Menurut Nasution (1996:32), transportasi diartikan sebagai proses pemindahan barang secara fisik dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: 1. Terdapat barang atau beban yang harus dibawa. 2. Tersedia sarana transportasi untuk mengangkut muatan tersebut. 3. Tersedia infrastruktur jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 2 ayat (2) mobil barang Termasuk di dalamnya adalah kendaraan seperti mobil bak terbuka, mobil dengan bak tertutup, mobil tangki, serta kendaraan penarik.

Over Dimention Over Loading (ODOL)

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, istilah (odol) mengacu pada *Over Dimension Over Loading*, yang berarti kendaraan (terutama truk) yang dimensinya (ukuran) dan/atau muatannya melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan. Ini mencakup truk yang memiliki ukuran fisik di luar standar yang diizinkan dan juga truk yang mengangkut muatan melebihi kapasitas yang seharusnya.

Pada pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, ditetapkan bahwa setiap individu yang menggunakan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan ke dalam

wilayah Kota Pekanbaru, serta yang membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor hingga mengubah tipe aslinya termasuk kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam kota namun tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Metode

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan penelitian tersebut menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki. Tujuan penelitian ini untuk menjawab dan menganalisis Pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling dengan pendekatan non probability Sampling, dimana Informan yang digunakan merupakan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti, teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memilih sampel yang dianggap paling relevan dan representatif untuk tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada beberapa indikator dan sub indikator yang penulis paparkan untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru. Indikator yang penulis gunakan dalam mencari dan menjawab hasil penelitian ini yaitu berdasarkan 3 indikator menurut M Manullang (2005:183) yaitu. Menetapkan Alat ukur (Standar), Mengadakan Tindakan Penilaian (evaluasi) dan Melakukan Tindakan Perbaikan (*corrective action*) Berikut hasil penelitian tentang Pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru:

1. Menetapkan Alat ukur (Standar)

a. Standar Operasional Penggunaan Alat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka disimpulkan bahwa pengawasan ODOL sudah berlandaskan regulasi kuat dan penindakan tegas, masih banyak truk yang melebihi muatan dan dimensi yang terjaring razia. Banyak kendaraan diberhentikan dan ditilang karena melanggar aturan. Kendala utama pengawasan adalah keterbatasan alat timbang manual dan portabel, sehingga pengawasan belum optimal dan tidak menjangkau semua titik rawan pelanggaran. Untuk itu, perlu perbaikan fasilitas, agar pengawasan lebih efektif dan infrastruktur jalan tetap aman dan terjaga.

b. Menetapkan Batas Dimensi kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka disimpulkan bahwa dari wawancara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan instansi yang terkait mereka rutin mengawasi dimensi kendaraan angkutan barang dengan alat ukur standar yang dikalibrasi dilapangan. Namun, kendala seperti alat ukur yang kurang memadai dan gangguan teknis memperlambat proses pengukuran. Dari observasi dilapangan masih banyak pengemudi membawa kendaraan melebihi batas dimensi karena tekanan perusahaan dan kebutuhan operasional. Begitupun hasil wawancara dari salah satu informan menjelaskan mereka sudah melakukan Sosialisasi terhadap pengemudi tentang peraturan batas dimensi, tapi kesadaran pengemudi terhadap mematuhi aturan perlu terus ditingkatkan demi menjaga keselamatan dan kelestarian jalan.

c. Menetapkan Berat muatan kendaraan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka ini tentang pengawasan berat muatan di Kota Pekanbaru sudah didasarkan pada regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang terstruktur dengan penindakan tegas. Namun, hambatan teknis dan sosial ekonomi masih mengganggu efektivitas penerapan aturan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas alat timbang, memperluas pos timbang, penegakan hukum yang adil dan konsisten melibatkan semua pihak, serta edukasi dan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi dan pemilik kendaraan.

d. Mewujudkan ketertiban

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama instansi terkait secara rutin melakukan pengawasan dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam berkendara., Dinas perhubungan selalu menggelar razia gabungan untuk menindak kendaraan yang melebihi batas muatan sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan batas berat muatan berlandaskan regulasi daerah yang ketat demi menjaga keselamatan lalu lintas dan kelestarian infrastruktur jalan. Dari hasil observasi dilapangan meskipun pengawasan sudah berjalan, tetapi masih ditemukan kendala seperti keterbatasan alat timbang, fasilitas yang belum merata, dan tekanan ekonomi yang memaksa beberapa pengemudi membawa muatan berlebih. Upaya perbaikan berupa peningkatan fasilitas, koordinasi, serta edukasi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan terus dilakukan untuk menekan pelanggaran dan mendukung keselamatan jalan. Secara keseluruhan, penetapan dan pengawasan berat muatan di Pekanbaru menunjukkan progres positif, namun perlu peningkatan sarana dan pendekatan yang lebih menyeluruh agar pengawasan lebih efektif.

e. Menjaga keamanan dan kenyamanan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka Pengawasan kendaraan ODOL di Pekanbaru sudah dilakukan secara rutin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara dengan alat ukur terkalibrasi dan pos pengawasan strategis untuk mencegah kerusakan jalan dan kecelakaan, sehingga menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Namun, keterbatasan alat timbang yang kurang akurat, prosedur penindakan yang lama, serta beban sanksi yang lebih berat pada sopir menjadi kendala. Selain itu, minimnya pos pengawasan yang tersebar merata, dengan pos utama di Jalan Garuda Sakti yang masih dalam perbaikan, menghambat pengawasan menyeluruh. Kurangnya pos pengawasan di pintu masuk kota membuka peluang pelanggaran ODOL yang tidak terdeteksi, berisiko merusak jalan dan mengancam keselamatan. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana, seperti penambahan alat timbang portabel dan pembangunan pos pengawasan di setiap pintu masuk, sangat diperlukan agar pengawasan optimal, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga dengan baik.

2. Mengadakan Tindakan Penilaian (evaluasi)

a. Penilaian atau perbandingan kinerja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka Penilaian ini menggunakan indikator utama seperti tingkat kepatuhan pengemudi terhadap batas muatan dan dimensi, frekuensi pelanggaran yang terdeteksi, serta penindakan oleh aparat gabungan. Data hasil pengawasan secara berkala dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian pengawasan sesuai rencana. Hasil observasi dilapangan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan ODOL, meskipun pelanggaran masih ditemukan. Perbandingan kinerja pengawasan dengan target membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan frekuensi razia dan penindakan yang lebih konsisten.

b. Laporan mengenai perkembangan pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka pengawasan ODOL di Pekanbaru sudah menunjukkan kemajuan lewat operasi gabungan dan pos pengawasan terpadu, namun pelanggaran masih tinggi karena keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran pengemudi. Dari observasi dilapangan menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan fasilitas, koordinasi yang kuat agar keamanan dan kenyamanan terjaga.

3. Menetapkan Tindakan Perbaikan (*corrective action*).

a. Perbandingan Penilaian Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka Pengawasan ODOL di Pekanbaru dilakukan dengan membandingkan kondisi kendaraan dan muatan di lapangan terhadap standar yang berlaku. Jika ditemukan penyimpangan, langsung diambil tindakan korektif mulai dari sosialisasi hingga penindakan tegas. Dari hasil observasi masih banyak ditemukan pelanggaran odol, Meskipun telah terjadi kemajuan melalui penindakan dan edukasi, keterbatasan fasilitas serta tekanan ekonomi masih menjadi kendala utama yang menghambat pengawasan dan penurunan pelanggaran ODOL secara signifikan.

b. Penilaian penyimpangan pengawasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka Pengawasan ODOL di Kota Pekanbaru sudah dilakukan secara rutin, langsung di lapangan, dan melibatkan koordinasi erat antarinstansi terkait. Meskipun demikian, masih ditemukan penyimpangan berupa kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi. Penyimpangan ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas seperti jembatan timbang yang belum merata, koordinasi yang perlu terus ditingkatkan, serta tekanan sosial ekonomi yang memaksa pengemudi melanggar aturan. Penindakan tegas dan razia gabungan yang sering dilakukan menunjukkan komitmen serius dalam menekan pelanggaran. Namun, konsistensi penindakan dan peningkatan fasilitas serta edukasi masih diperlukan agar penyimpangan pengawasan dapat diminimalisir secara efektif demi keselamatan dan kelestarian infrastruktur jalan

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan terdapat sub indikator dari 3 indikator yang ada dalam proses Pengawasan yang belum terlaksana dengan baik. dimana indikator menetapkan alat ukur/standar fasilitas sarana prasarana seperti alat timbang yang masih kurang sehingga dapat menghambat dalam Pengawasan *Over Dimension Over Loading* tersebut, pada indikator Mengadakan Tindakan penilaian/ evaluasi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pengemudi mengenai aturan *Over Dimension Over Loading*, sehingga masih banyak pengemudi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan indikator selanjutnya melakukan Tindakan perbaikan kurangnya anggaran dalam Pengawasan *Over Dimension Over Loading* ODOL pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sehingga hal ini tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Amalia, Hany. 2017. Pengawasan Pengangkutan Barang Di Kota Dumai. 4(2). 5-6
- Arikunto, 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakaruddin, dkk. 2016. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih Di Kab. Pelalawan*. Universitas Muhammadiyah Riau

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Cochran, Charles L. & Eloise F. Malone. 1995. *Public policy: Perspectives and Choices*. New York: Me Graw-Hill,inc.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dye, Thomas R (1992) "Understanding Public Policy". New Jersey : Prentice Hall
- Feriyanto, Andri Dan Shita, Endang Triana, 2015. *Pengantar manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediatera.
- Keban, Yeremis T. 2008. *Enam dimensi strategis administrasi public: konsep, Teori, DanIsu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Maisis Susilawati, 2018. *Analisis Pengawasan Penertiban Izin Kelayakan Kendaraan Bermotor Pada Dinas Upt Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*.
- M. Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Manullang, 2015, *Dasar- Dasar Manajeme*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Fadhly Gifarhy. 2018. *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Medan (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Pelawi, Roy Andalan. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengangkutan Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*. Universitas Sriwijaya
- Rozi, Syairur. 2021. *Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Over Dimension Over Loading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. 2(1). 14-16
- Siagian, Sondang P. 2015. *Filsafat administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2017. *Metode penelitian*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Public*. Jakarta, Erlangga.
- Terry R, George. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Veni Tri Hafifah. 2021. *Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Mengawasi Penggunaan Trotoar menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Fiqh Siyasah*
- Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: badan penerbit Fisipol UIR.

Jurnal/Artikel

- Sari, G. M., & Rusli, Z. (2023). Pengawasan kendaraan *over dimension over loading* (odol) di jalan lintas indragiri hulu. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 012-021.
- Oktarinda, E., Prihutomo, N. B., & Maulani, E. O. (2022). Analisis Pengaruh Kendaraan Odol Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Jalan Tol. *Construction and Material Journal*, 4(1), 49-57.
- Antono, L. (2022). Implementasi kebijakan odol dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), 1720-1729.
- Hanif, M. F., & Muslim, I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Over Dimension Over Load Di Kota Samarinda. *Borneo Studies and Research*, 4(1), 336-342.
- Yassin, M. A., Rahmadanik, D., & Widiyanto, M. K. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(04), 32-38.
- Bayu Aji, A. (2023). *KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ODOL (OVER DIMENSION OVER LOADING) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.

- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliato, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.

- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezeki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

Syafariyani¹ dan Lilis Suriani²

- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.

- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan

- Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 469 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019, Tentang penyelenggaraan Angkutan Barang Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.